

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS) terhadap data panel enam negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam selama periode 2004–2023, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Digitalisasi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di enam negara ASEAN. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi mampu menurunkan ketimpangan pendapatan melalui perluasan akses masyarakat terhadap informasi, teknologi, layanan keuangan digital, serta berbagai peluang ekonomi. Dengan semakin berkembangnya transformasi digital, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan diterima.
2. Kualitas tata kelola pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di enam negara ASEAN. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintah belum mampu memberikan pengaruh secara langsung terhadap perubahan tingkat ketimpangan pendapatan selama periode penelitian. Meskipun kualitas tata kelola pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, pengaruhnya terhadap pemerataan pendapatan cenderung bekerja melalui mekanisme tidak langsung dan memerlukan dukungan kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kualitas tata

kelola pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ditolak.

3. Variabel interaksi antara digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah (DIG×GOV) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di enam negara ASEAN. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah memperkuat pengaruh digitalisasi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, manfaat digitalisasi terhadap pemerataan pendapatan akan semakin optimal apabila didukung oleh tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa interaksi digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan diterima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan faktor yang berperan secara langsung dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN, sedangkan kualitas tata kelola pemerintah belum memberikan pengaruh langsung yang signifikan. Namun demikian, kualitas tata kelola pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas digitalisasi melalui efek interaksi, sehingga penguatan transformasi digital perlu diiringi dengan perbaikan tata kelola pemerintah agar manfaat pembangunan digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang diberikan:

1. Bagi pemerintah negara-negara ASEAN, transformasi digital perlu terus didorong melalui peningkatan akses internet, pembangunan infrastruktur digital, perluasan layanan keuangan digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan

ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih inklusif dan berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

2. Pemerintah perlu memperkuat kualitas tata kelola pemerintah melalui peningkatan efektivitas birokrasi, transparansi, akuntabilitas, kualitas regulasi, serta kapasitas kelembagaan. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah tidak berpengaruh secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan, hasil penelitian juga membuktikan bahwa tata kelola pemerintah mampu meningkatkan efektivitas digitalisasi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan transformasi digital perlu diintegrasikan dengan reformasi tata kelola pemerintah agar manfaat digitalisasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kelompok masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan indikator digitalisasi maupun kualitas tata kelola pemerintah yang lebih beragam, memperluas cakupan negara penelitian, atau menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti kualitas pendidikan, inklusi keuangan, struktur pasar tenaga kerja, maupun kebijakan fiskal. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode estimasi atau pendekatan ekonometrika yang berbeda sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.